BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai evaluasi kebijakan penanggulangan bencana abrasi di desa pondok kelapa kabupaten bengkulu tengah serta pembahasan yang mengacu pada teori evaluasi kebijakan william n. Dunn, dapat diketahui bahwa kebijakan penanggulangan bencana abrasi telah dilakukan melalui berbagai upaya pemerintah desa dan masyarakat, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal tersebut terlihat dari masih berlangsungnya abrasi yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat serta belum adanya tindakan penanganan secara nyata yang mampu mengurangi dampak abrasi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang ditemukan berdasarkan masing-masing indikator evaluasi kebijakan sebagai berikut.

Berdasarkan indikator efektivitas**,** kebijakan penanggulangan bencana abrasi di desa pondok kelapa belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan. Pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya seperti penyampaian laporan, koordinasi, serta pengusulan penanganan kepada pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Namun, upaya tersebut belum menghasilkan perubahan yang signifikan karena abrasi masih terus terjadi dan berdampak terhadap masyarakat seperti hilangnya kebun, rumah, serta fasilitas masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan masih memerlukan tindakan nyata agar tujuan penanggulangan abrasi dapat tercapai.

Pada indikator efisiensi**,** pelaksanaan kebijakan penanggulangan abrasi masih mengalami kendala terutama dalam aspek sumber daya dan anggaran. Penanganan abrasi membutuhkan biaya yang besar sehingga pemerintah desa dan masyarakat belum mampu melakukan penanganan secara mandiri. Upaya yang dilakukan masyarakat seperti penanaman mangrove telah menjadi bentuk kepedulian dalam mengurangi dampak abrasi, namun belum cukup untuk mengatasi permasalahan abrasi yang semakin parah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa diperlukan dukungan sumber daya dan anggaran dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Pada indikator kecukupan**,** kebijakan penanggulangan abrasi belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Masyarakat telah mengalami berbagai kerugian akibat abrasi seperti hilangnya lahan, kebun, dan semakin dekatnya jarak rumah dengan laut. Masyarakat berharap adanya penanganan yang lebih besar seperti pembangunan penahan abrasi agar wilayah tempat tinggal mereka tetap terlindungi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang berjalan masih belum cukup dalam memberikan solusi terhadap permasalahan abrasi di desa pondok kelapa.

Pada indikator pemerataan**,** dampak abrasi telah dirasakan oleh masyarakat yang berada di wilayah pesisir desa pondok kelapa, terutama masyarakat yang kehilangan lahan dan sumber penghasilan. Namun, manfaat dari kebijakan penanggulangan abrasi belum dirasakan secara langsung oleh masyarakat terdampak karena belum adanya perlindungan atau penanganan yang nyata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan

abrasi masih perlu memperhatikan masyarakat yang menjadi kelompok paling terdampak agar memperoleh perlindungan yang sesuai.

Pada indikator responsivitas**,** masyarakat dan pemerintah desa telah menunjukkan upaya dalam menyampaikan permasalahan abrasi melalui berbagai pihak seperti bpbd, pupr, dpr, pemerintah daerah, bws viii, hingga kementerian pupr. Namun, respon yang diberikan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat karena sampai saat ini belum terdapat tindakan penanganan yang dapat dirasakan langsung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa koordinasi dan tindak lanjut antar pihak masih perlu ditingkatkan agar aspirasi masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang nyata.

Selanjutnya pada indikator ketepatan**,** kebijakan penanggulangan abrasi sudah sesuai dengan permasalahan yang terjadi karena bertujuan untuk mengurangi risiko bencana dan melindungi masyarakat pesisir. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut masih membutuhkan penyesuaian dengan kondisi abrasi di lapangan yang semakin parah dan membutuhkan penanganan khusus. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan abrasi perlu diperkuat agar mampu memberikan hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa pondok kelapa.

5.1 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat disarankan untuk lebih meningkatkan perhatian terhadap permasalahan abrasi di Desa Pondok Kelapa melalui

percepatan program penanganan abrasi. Mengingat kondisi abrasi yang semakin parah dan telah memberikan dampak terhadap masyarakat, diperlukan tindakan nyata seperti pembangunan penahan abrasi atau infrastruktur pengendalian abrasi. Selain itu, koordinasi antar instansi terkait perlu diperkuat agar proses penanganan tidak hanya berhenti pada tahap survei dan pengusulan, tetapi dapat diwujudkan dalam bentuk program yang nyata.

2. Pemerintah Desa Pondok Kelapa disarankan untuk terus melakukan koordinasi dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pihak terkait serta melakukan pemantauan terhadap perkembangan kondisi abrasi. Pemerintah desa juga perlu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan mitigasi bencana seperti menjaga lingkungan pesisir dan mendukung program pengurangan risiko abrasi.
3. Masyarakat Desa Pondok Kelapa diharapkan tetap berperan aktif dalam menjaga wilayah pesisir serta mendukung upaya penanggulangan abrasi yang dilakukan bersama pemerintah. Partisipasi masyarakat melalui kegiatan seperti penanaman mangrove perlu terus dilakukan sebagai bentuk upaya mengurangi dampak abrasi, meskipun penanganan utama tetap membutuhkan dukungan pemerintah.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai strategi penanganan abrasi, efektivitas pembangunan infrastruktur pengendalian abrasi, maupun peran antar lembaga pemerintah dalam mengatasi permasalahan bencana pesisir agar dapat memberikan kajian yang lebih mendalam.